

Kebijakan Impor Beras Indonesia dari Thailand Tahun 2014-2018

Chikita Eka Maharani dan Prof. Dr. Tulus Warsito, M. Si.¹

Prodi Hubungan Internasional

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang kebijakan impor beras Indonesia dari Thailand tahun 2014-2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis lebih dalam guna mengetahui alasan Indonesia masih melakukan impor beras dari Thailand saat sedang surplus beras di tahun 2014-2018. Berdasarkan atas penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa impor beras yang dilakukan saat sedang surplus beras karena adanya kepentingan-kepentingan aktor politik sehingga mengeluarkan kebijakan impor beras dan juga untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia.

Keywords; Impor Beras, Surplus Beras, Thailand, Kerjasama Bilateral, Ketahanan Pangan,

¹ Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Korespondensi: chikitaeka98@gmail.com

Pendahuluan

Pangan merupakan sebuah kebutuhan dasar yang paling esensial bagi manusia untuk mempertahankan hidup. Sebagai makhluk hidup, manusia membutuhkan pangan untuk melangsungkan hidup agar dapat berkembang biak dan bermasyarakat. Oleh karena itu, dengan tercukupinya kebutuhan pangan merupakan salah satu penentu bagi perwujudan ketahanan pangan nasional. Bagi Indonesia, beras sebagai makanan pokok utama sering diindentikan sebagai pangan. Gangguan pada ketahanan pangan yang menyebabkan krisis ekonomi di tahun 1997/1998 karena meroketnya kenaikan harga beras, yang kemudian berkembang menjadi krisis multidimensi, sehingga dapat memicu kerawanan social yang menyebabkan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional dalam bahaya (Bulog, 2014).

Isu beras dan petani di Indonesia merupakan sebuah ironi. dengan jumlah yang banyak, Indonesia tetap melakukan impor, padahal Indonesia sendiri merupakan negara penghasil beras. Suatu negara akan melakukan impor beras, jika tidak tercukupinya produksi atau surplus beras dalam negeri. Akan tetapi, data yang ada menunjukkan Indonesia melakukan impor beras saat sedang surplus. Indonesia melakukan impor beras untuk kepentingan publik dengan adanya bentuk kebijakan stabilitas harga yang ditujukan untuk menolong konsumen sehingga konsumen bisa mendapatkan beras dengan harga yang terjangkau. Dengan adanya kebijakan ini, maka harus adanya pula kekuatan cadangan beras yang dimiliki negara. Semakin kuat cadangan beras suatu negara, maka semakin mampu negara tersebut menekan pasar untuk mengikuti harga yang diputuskan negara tersebut.

Di tahun 2014, Indonesia mengimpor beras dari Thailand sebanyak 0,3 juta ton, dan produksi serta konsumsi beras nasional di angka yang sama, yaitu 34,5 juta ton. Sedangkan di tahun 2015, beras yang di impor dari Thailand mengalami penurunan di angka 0,1 juta ton. Menurut catatan Kementerian Pertanian, jumlah konsumsi beras nasional mengalami penurunan pada tahun 2015 dibanding pada tahun 2013 dan 2014. Namun di tahun 2015, Indonesia justru mengalami surplus, produksi beras mencapai 43,9 juta ton, namun jumlah konsumsi beras hanya mencapai 33,3 juta ton per tahunnya. Sesungguhnya Indonesia sedang mengalami surplus beras sebanyak kurang lebih 10,6 juta ton beras di tahun 2015 (Databoks, 2018).

Dari catatan Kemedag, sejak tahun 2016 Indonesia sudah tidak mengimpor beras lagi, terutama beras medium. Hanya saja Indonesia masih melakukan impor beras premium yang dibutuhkan oleh industri makanan dan restoran di Indonesia (Fauzi, 2017). Namun, di tahun 2016 masih tercatat di BPS kalau Indonesia masih melakukan impor beras, terlebih lagi dari Thailand mengalami kenaikan dari tahun 2015 sebanyak 0,5 juta ton. Di tahun ini pula Indonesia masih mengalami surplus beras nasional sebesar 12,6 juta ton.

Menurut data Kementerian Pertanian dalam Outlook Padi 2015, produksi beras pada tahun 2017 mencapai 46,2 juta ton dan dengan konsumsi beras yang hanya mencapai 32,7 juta ton. Sehingga di tahun 2017, Indonesia mengalami surplus beras sebanyak 9,9 juta ton. Namun, meskipun surplus beras, Indonesia tetap melakukan impor beras dari Thailand sebanyak 0,2 juta ton. Sedangkan di tahun 2018, Indonesia masih mengalami surplus sebesar 14,3 juta ton, dengan

produksi beras mencapai 47,4 juta ton dan konsumsinya mencapai 33,1 juta ton. Impor beras dari Thailand masih tetap dilakukan meskipun data menunjukkan surplus. Di tahun 2018, impor beras dari Thailand mencapai 0,7 juta ton, angka ini merupakan tertinggi sejak impor beras dari tahun 2014 (Databoks, 2018).

Thailand sendiri merupakan negara terbesar ke 2 yang menjadi pilihan Indonesia dalam mengimpor beras, dengan negara terbesar pertama adalah Vietnam. Letak geografis Thailand juga yang lebih dekat dengan Indonesia. Impor beras dari Thailand dilakukan Indonesia sejak tahun 1989 hingga saat ini. Data BPS menjelaskan, bahwa polemik impor beras di tahun 2014-2018 jika produksi padi Indonesia mengalami peningkatan dan tetap mengimpor beras dengan jumlah yang cukup banyak. Sehingga menyebabkan Indonesia mengalami surplus beras pada tahun 2014-2018.

Kerangka Teori

Penulis menggunakan dua teori untuk menganalisis lebih mendalam terhadap kebijakan impor beras Indonesia pada tahun 2014-2018 tersebut. Pertama, penulis menggunakan teori sistem pengambilan keputusan. Kerangka pengambilan keputusan bermaksud untuk menunjukkan apa yang harus dipertimbangkan dalam mempelajari bagaimana dan apa sebab suatu bangsa bertindak dalam politik internasional. Dalam konteks pengambilan keputusan, kebijakan luar negeri diasosiasikan dengan perilaku aktor-aktor tersebut.

Terdapat dua factor utama yang menurut Snyder mempengaruhi proses pengambilan keputusan, yaitu factor subyektif dan sumber-sumber potensial. Fac

ktor subyektif adalah persepsi aktor dalam mendefinisikan situasi. Persepsi ini berpengaruh cukup besar dalam situasi apapun, bagaimana aktor menginterpretasikan kondisi tersebut akan sangat menentukan hasil dari proses pengambilan keputusan. Kemudian, faktor potensial bisa berasal dari dalam negeri (setting internal) maupun luar negeri (setting eksternal). Setting internal sendiri merupakan sebuah politik domestic yang termasuk opini public, sedangkan setting eksternal adalah factor-faktor non pemerintah dan interaksi antar negara, seperti budaya, masyarakat, perdagangan, dan lain-lain. Sehingga menurut Snyder, tindakan negara merupakan hasil kombinasi dari aktor, tujuan, situasi, dan cara (Rosyidin, 2010).

Kedua, teori *food security* atau teori ketahanan pangan.. Ketahanan pangan sering kali diidentikkan dengan suatu keadaan dimana pangan tersedia bagi setiap individu setiap saat dimana saja baik secara fisik maupun ekonomi. Terdapat tiga aspek yang menjadi indicator ketahanan pangan suatu wilayah, yaitu sector ketersediaan pangan, stabilitas ekonomi (harga) pangan, dan akses fisik maupun ekonomi bagi setiap individu untuk mendapatkan pangan.

Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2012, ketahanan pangan merupakan kondisi dimana terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Untuk mencapai kondisi ketahanan pangan rumah tangga, terdapat 3 komponen yang harus dipenuhi, yaitu kecukupan

ketersediaan pangan, tercukupinya kebutuhan konsumsi, dan distribusi pangan yang merata (Safitri, 2014).

Sifat produksi komoditi pangan yang musiman serta berfluktuasi karena pengaruh dari cuaca/iklim tidak dapat lepas dari ketahanan pangan. Ketersediaan pangan nasional mudah dipengaruhi karena perubahan iklim atau cuaca yang mempengaruhi perilaku produksi itu. Baik untuk produsen maupun konsumen akan sangat dirugikan jika tidak adanya kebijakan pangan yang tangguh demi melengkapi perilaku produsen yang rentan terhadap perubahan iklim, khususnya bagi konsumen yang berpendapatan rendah dan produsen berskala produksi kecil. Pemerintah terdorong untuk melakukan intervensi demi mewujudkan kebijakan ketahanan pangan karena adanya lahan produksi petani yang terbatas, karakteristik komoditi pangan yang mudah rusak, lemahnya penanganan panen dan pasca panen, dan kurang memadainya sarana prasarana pendukung pertanian (Bulog, 2014).

Metode Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif (descriptive research) merupakan suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang saat ini sedang berlangsung maupun saat yang lampau. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu sumber data yang terkumpul secara tidak langsung melalui orang lain ataupun dokumen. Data-data yang diperoleh yaitu dapat dengan membaca, mempelajari, ataupun dari lembaga seperti Badan Pusat Statistik Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dan beberapa lembaga lainnya. Metode yang

digunakan untuk mengumpulkan data lebih lebih bersifat library research atau studi kepustakaan, dimana penulis menggunakan data sekunder, seperti buku, surat kabar, jurnal, artikel, dan menggunakan situs-situs internet.

Pembahasan

Pemerintah Indonesia melakukan impor beras memiliki tujuan untuk menjamin ketersediaan stok pangan nasional sehingga tidak terjadi krisis pangan yang dapat mengakibatkan Indonesia mengalami gangguan kestabilan nasional. Hingga saat ini Indonesia tetap melakukan impot beras, terlebih lagi Indonesia mengimpor beras dari negara tetangga, yaitu Thailand. Impor beras dari Thailand dilakukan Indonesia karena telah terjalin dalam suatu nota kesepakatan Memorandum Of Understanding (MoU) yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. MoU tersebut ditandatangani oleh Mendag masing-masing sejak 2002, dan diperbaharui setiap tahunnya. Di awal tahun 2001, Thailand menyepakati nota kesepahaman (MoU) pengadaan beras untuk Indonesia melalui skema G-to-G (antar pemerintah) hingga 1,5 juta ton per tahunnya. Setiap tahunnya MoU tersebut akan diperbaharui kembali, sesuai dengan kondisi yang terjadi (Dewi, 2018).

Akan terjadi kenaikan harga beras nasional jika Indonesia tidak melakukan impor beras, karena permintaan akan beras lebih tinggi daripada jumlah persediaan dalam negeri. Namun jika impor terus dilakukan akan menghancurkan harga beras di tingkat petani, karena harga beras para petani tersebut akan dipermainkan para tengkulak.

Jumlah permintaan beras melebihi surplus meskipun jumlah impor beras sering mengalami surplus. Desakan impor tersebut untuk menjaga kuota ketersediaan beras agar mencukupi menyebabkan pemerintah mau tidak mau harus mengimpor beras. Banyak mafia impor yang mempermaikan realisasi impor beras ini. Sebenarnya pemerintah ingin membatasi impor beras, namun swasta ternyata terus mengimpor beras. Pemerintah sendiri tampak kebingungan dalam menjelaskan kepada masyarakat, karena jika terjadi fenomena seperti ini biasanya pemerintah yang menjadi sasaran untuk disalahkan. Hal ini rentan terjadi karena minimnya pengawasan terhadap kegiatan impor, terutama di kepabean. Pemerintah seharusnya lebih memperketat pemeriksaan impor beras ke Indonesia (Dewi, 2018). adanya kebijakan impor beras disaat Indonesia sedang surplus tentunya karena ada pengaruh dalam kondisi dalam negeri yang menyebabkan Indonesia masih melakukan impor beras.

Kepentingan Aktor-Aktor Politik

Indonesia melakukan kegiatan impor beras, karena untuk meningkatkan produksi beras untuk mencapai swasembada beras, serta untuk memenuhi kebutuhan pangan Indonesia. Kedua pilihan ini memiliki argument dan kelemahannya masing-masing. Pihak pro produksi beras menilai bahwa drngan adanya swasembada beras maka akan meningkatkan kesejahteraan petani dan mengurangi angka kemiskinan karena Indonesia merupakan negara agraris dimana penduduknya sebagian besar sebagai petani. Namun, argument tersebut dibantah oleh pihak pro impor beras, dimana luas sawah Indonesia masih kalah luas dari negara penghasil beras lain, seperti Thailand, maka hal tersebutlah yang

menyebabkan harga beras di Indonesia cenderung lebih mahal daripada Vietnam dan Thailand.

Menurut pihak yang mendukung pro impor beras, dengan melakukan impor beras maka harga beras di Indonesia bisa lebih murah. Lagi-lagi kargumen tersebut juga ditentang karena dengan adanya liberalisasi perdagangan beras dinilai mengkhianati petani Indonesia serta memiliki kepentingan terutama yang diambil dari keuntungan impor beras. Dalam era Jokowi, pemerintah selalu melakukan impor beras, dimana pada tahun 2018 impor beras mencapai 2 juta ton. Hal ini disebabkan karena pemerintah sudah membuat izin impor sebanyak 2 kali (Gumiwang, 2019).

Kementerian Perdagangan pada masa kepemimpinannya Rachmat Gobel cenderung pro produksi beras dan menolak untuk impor beras. Menurutnya, impor menjadi opsi terakhir untuk dilakukan saat stok Bulog menipis sehingga perlu memperbesar stok minimal Bulog sebagai cadangannya. Namun hal ini menyebabkan lengesernya Gobel di Menteri Perdagangan, karena diduga adanya pihak yang tidak menyukainya dan adanya kepentingan politik dan ekonomi.

Kemudian Gobel digantikan oleh Lembong, dimana kebijakan yang berkaitan dengan impor menjadi dipermudah. Pada tahun 2015-2016 saat masa jabatan Lembong, Indonesia melakukan impor beras sekitar 2 juta ton. Hal ini akan menimbulkan berbagai permasalahan yang akan terjadi, seperti semakin banyaknya impor beras yang masuk ke Indonesia dapat membuat para petani local menjadi khawatir karena persaingan dagang lebih sulit.

Pada September 2015, pemerintah menurut Jusuf Kalla melakukan impor beras dari Thailand sebanyak 1,5 juta ton karena adanya El Nino. Namun, menurut Lembong, 1,5 juta ton merupakan angka yang kecil jika dibandingkan dengan konsumsi beras nasional yang mencapai 30 juta ton selama setahun. Hal tersebut ditentang oleh Henry Saragih, Ketua Serikat Petani Indonesia, yang mengatakan bahwa bencana kekeringan bukan suatu alasan Indonesia melakukan impor beras, justru yang harus dilakukan yaitu mencari solusi seperti, pendistribusi pompa air, pembuatan embung, hujan buatan, dan sebagainya.

Impor beras kembali terjadi saat Enggartiasto Lukita menjadi pemimpin di Menteri Perdagangan. Impor beras disaat kepemimpinannya mencapai angka 2 juta ton. Hal ini dikiritk oleh Bulog yang dijabah oleh Budi Waseso dan juga Kementerian Pertanian yang menganggap belum perlu impor beras karena stok yang dimiliki masih mencukupi.

Saat Budi Waseso memimpin Bulog, Buwas cenderung menolak impor beras. Meskipun Kementerian Perdagangan membuka kran impor beras, Buwas membuat beberapa upaya untuk menolak impor. Jika Bulog menolak impor beras jenis umum maka reaslisasi impor beras akan sulit dilakukan karena dalam produsen impor beras, Bulog merupakan satu-satunya Lembaga pengelola beras yang boleh mengimpor beras jenis umum. Bulog berkerjasama dengan Kementerian Pertanian demi Percepatan Serap Gabah Petani (Sergap) tahun 2018. Dalam kerjasama tersebut, Bulog memiliki kewajiban, yaitu menjaga ketahanan pangan, ketersediaan pangan, dan keterjangkauan serta stabilitas pangan. Buwas juga berencana akan melakukan ekspor beras untuk mengantisipasi kelebihan

produksi beras saat panen raya, sehingga harga beras tidak anjlok saat panen raya terjadi dan tidak menyebabkan kerugian bagi petani.

DPR memiliki dua komisi terkait kebijakan impor beras yaitu komisi IV dan komisi VI. Komisi IV memiliki ruang lingkup bidang pertanian dan pangan serta memiliki mitra kerja Kementerian Pertanian dan Bulog, sedangkan Komisi VI memiliki ruang lingkup bidang perdagangan dengan mitra kerja Kementerian Perdagangan. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan bahwa kebijakan impor beras harus dihapus dari program pemerintah, sebab Indonesia masih danggup untuk memproduksi pangan. Pada 23 Mei 2018, Komisi IV DPR mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dirut Perum Bulog Budi Waseso dan jajarannya. Dalam rapat tersebut, Komisi IV dan Bulog depakat menolak impor beras, karena masih tercukupinya ketersediaan beras dalam negeri. Sedangkan, pada 18 Januari 2018, Komisi VI DPR melakukan rapat kerja dengan Menteri Perdagangan dan jajarannya yang juga dihadiri oleh Perum Bulog, Kementerian BUMN, dan PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, cenderung berpihak kepada petani local daripada melakukan impor beras. Kementerian Pertanian berupaya untuk meningkatkan produksi beras medium dengan cara memaksimalkan rawa dan juga meingkatkan waktu tanam menjadi tiga kali dalam setahun yang sebelumnya hanya dua kali dalam setahun.

Meskipun Indonesia sedang mengalami surplus beras, namun Kementerian Perdagangan justru memutuskan melakukan impor beras pada bulan Januari 2018

saat masa panen raya. Hal ini jelas melanggar aturan, dan yang dilakukan Kementerian Perdagangan tidak tepat karena dapat merugikan petani local.

Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Bulog, serta DPR berkontestasi berupaya memenangkan kepentingannya. Dalam era pemerintahan Jokowi, kompetisi kebijakan impor beras cenderung dimenangkan oleh Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan dapat mengeluarkan izin impor beras, sedangkan Kementerian Pertanian tidak dapat menolak impor beras tetapi hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada Kementerian Pertanian. Untuk mendengarkan aspirasi dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perdagangan, serta Bulog, DPR dapat melakukan rapat yang dapat menghasilkan keputusan bersama. Pemerintah juga perlu mendukung pertanian Indonesia sehingga dapat meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani. Kebijakan impor beras merupakan upaya terakhir pemerintah saat kondisi beras memang tidak mencukupi (Kusumah, 2019).

Ketahanan Pangan Indonesia

Beras merupakan sebuah makanan pokok paling penting sehingga ini menyebabkan adanya nilai strategis beras. Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangannya terutama yang bersumber dari peningkatan produksi dalam negeri. Pertimbangan pentingnya beras menjadi semakin tinggi bagi Indonesia dimana jumlah penduduk semakin besar dengan sebaran populasi yang luas dan cangkupan geografis yang tersebar. Indonesia harus bisa untuk menjaga ketahanan pangannya. Jika ketahanan pangan terganggu, berbagai gejala

sosial dan politik juga dapat terganggu. Kondisi kritis seperti ini dapat meruntuhkan pemerintah yang sedang berkuasa karena membahayakan stabilitas nasional.

Gangguan ketahanan pangan seperti kenaikan harga beras pada waktu krisis ekonomi dapat memicu kerawanan sosial yang membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. Daripada itulah pemerintah selalu berupaya untuk menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan Indonesia bagi masyarakat, dengan cara produksi dalam negeri dan juga tambahan impor. Untuk memenuhi kriteria konsumsi maupun logistik (yang mudah diakses oleh setiap orang) dan diyakini bahwa di hari esok masih ada ketersediaan pangan untuk rakyat, Indonesia harus memiliki pangan dalam jumlah yang mencukupi dan juga tersebar.

Kebijaksanaan pangan nasional seharusnya dapat mengakomodasikan dan menyeimbangkan antara aspek penawaran/produksi permintaan dengan pertimbangan permasalahan pangan yang ada. Dengan adanya pengelolaan kedua aspek tersebut harus mampu mewujudkan ketahanan pangan nasional yang tangguh dalam menghadapi segala gejolak yang ada. Pengelolaan harus dilakukan seoptimal mungkin mengingat kedua aspek tersebut dapat tidak sejalan atau bertolak belakang (Bulog, 2014).

Meskipun Kementerian Pertanian menyajikan data pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian yang cukup mengesankan selama lima tahun terakhir, tak lantas menjamin ketahanan pangan Indonesia dalam kondisi aman. Angka kenaikan PDB pertanian mulai membaik, dengan rata-rata pertumbuhan 3,7% per tahun selama kurun 2014-2018, PDB pertanian meningkat menjadi Rp.

1.005,4 triliun yang sebelumnya berada angka Rp. 880,4 triliun. Dengan capaian tersebut, sering kali dianggap sebuah keberhasilan pembangunan sektor pertanian serta ketahanan pangan nasional. Perannya terhadap perekonomian dinilai semakin penting dan strategis. Di saat yang sama, publik justru kerap kali menghadapi isu impor beras, jagung, dan gejolak harga kebutuhan yang semakin naik yang menjadi sinyal bahwa ketahanan pangan tak bisa sepenuhnya dianggap baik.

Ketahanan pangan yang baik tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik dari segi jumlah maupun mutu. Untuk mengukur ketahanan pangan suatu negara dibutuhkan landasan dari aspek keterjangkauan dan pemerataan. Menurut Organisasi Pangan Dunia (FAO) mengatakan bahwa Ketahanan Pangan adalah kondisi ketika setiap orang, sepanjang waktu, memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap makanan bergizi dan cukup untuk dapat menjalani aktivitas hidup yang sehat (Leonard, 2019).

Sepanjang 2012-2018, ketahanan pangan nasional mulai menunjukkan perbaikan. Ini tercermin dari naiknya indeks ketahanan pangan global (Global Food Security Indeks/GFSI) Indonesia yang dinilai dari semua aspek menjadi 54,8 pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2012 dengan angka 46,8. Dengan skor tersebut Indonesia berada diposisi kelima di tingkat ASEAN dan diposisi ke 65 dunia. Penilaian indeks ketahanan pangan terdiri dari empat aspek: yang pertama, affordability terkait dengan cara memotong rantai pasok yang panjang; kedua, availability yang disebut dengan terjaganya penawaran; ketiga, quality and safety terkait dengan kualitas dan keamanan standar nutrisi dan pengawasan impor; dan

yang keempat, natural resources and resilience terkait dengan lahan dan produksi pangan.



Grafik 1.1 Indeks Ketahanan Pangan Indonesia (2012-2018)
Sumber : Databoks

Indeks yang masih berada dibawah angka 60 masih dapat dikatakan dengan kondisi pangan nasional yang masih dalam kondisi rentan, meskipun jika dilihat indeks ketahanan pangan memang membaik. Ketahanan pangan tidak selalu dapat dikaitkan dengan kemampuan produksi dalam negeri, dikarenakan ketahanan pangan diukur dengan aspek yang lebih berdasarkan pada ketersediaan pangan, daya beli, keamanan pangan, dan daya tahan (resilience). Ketersediaan tidak melihat dari mana asalnya, dapat melalui impor maupun produksi sendiri, sedangkan daya beli akan sangat bergantung pada kemampuan ekonomi masyarakatnya. Ketahanan pangan bukanlah soal kemampuan produksi semata, namun juga berasal dari pengaruh ketersediaan pangan yang membaik dan meningkatnya daya beli masyarakat (Leonard, 2019). Kebijakan pemerintah dalam

mengimpor beras sebagai agenda menjaga ketahanan pangan, sehingga hal ini diharapkan dapat menyejahterakan petani, pedagang, serta melindungi seluruh masyarakat Indonesia.

Kesimpulan

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Semakin bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia, kebutuhan akan beras pun juga semakin meningkat. Beras sendiri merupakan makanan pokok paling penting, dan beras ini dapat diidentikkan sebagai pangan. Indonesia harus menjaga ketahanan pangannya agar tidak terjadi krisis pangan yang akan mengganggu dan membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. Sehingga pemerintah selalu berupaya untuk menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan Indonesia dengan cara meningkatkan produksi beras dan juga impor sebagai tambahannya.

Tercatat sejak 2014-2018 Indonesia mengimpor beras dan Indonesia sedang surplus. Puncaknya di tahun 2018, dimana Indonesia surplus hingga 2,85 juta ton dan Indonesia tetap melakukan impor. Meskipun Indonesia sedang mengalami surplus beras, namun kebijakan impor beras memang perlu dilakukan, karena sebagai upaya untuk memenuhi stok beras nasional. Jika Indonesia tidak mengimpor beras, maka akan terjadi kenaikan pada harga beras dan hal ini akan membuat masyarakat menengah ke bawah kesulitan untuk bertahan hidup. Sesungguhnya, permintaan lebih banyak daripada jumlah persediaan beras dalam negeri.

Indonesia melakukan impor beras juga karena ada kondisi dalam negeri yang mempengaruhi beras nasional. Adanya kepentingan-kepentingan aktor-aktor politik yang membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan impor beras disaat Indonesia sedang surplus beras. Para aktor-aktor politik ini saling berkompetisi untuk memenangi kepentingannya agar tujuannya dapat tercapai. Selain itu dengan adanya kepentingan-kepentingan dari aktor-aktor politik dalam negeri, Indonesia mengimpor beras guna untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia. Dimana, seluruh kebutuhan masyarakat akan beras dapat tercukupi dan tidak menimbulkan harga beras yang melambung tinggi karena kelangkaan beras yang terjadi.

Daftar Pustaka

- Bulog. (2014). *Ketahanan Pangan*. Diambil kembali dari Bulog: <http://www.bulog.co.id/ketahananpangan.php>
- Databoks. (2018, Januari 12). *Inilah Perbandingan Produksi dan Konsumsi Beras Nasional*. Diambil kembali dari Databoks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/12/inilah-perbandingan-produksi-dan-konsumsi-beras-nasional>
- Databoks. (2018, Januari 12). *Inilah Proyeksi Produksi Beras Nasional*. Diambil kembali dari Databoks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/12/inilah-proyeksi-produksi-beras-nasional>
- Dewi, C. S. (2018). Landasan Faktor Kebijakan Impor Beras Asal Thailand Pada Tahun 2009-2011. *JOM FISIP Vol. 5: Edisi I Januari - Juni 2018*, 3.
- Dewi, C. S. (2018). Landasan Faktor Kebijakan Impor Beras Asal Thailand Pada Tahun 2009-2011. *JOM FISIP Vol. 5: Edisi I Januari - Juni 2018*, 5-8.
- Gumiwang, R. (2019, Agustus 23). 'Jor-Joran Buka Izin Impor Beras, Mengamankan Jokowi di 2019'. Diambil kembali dari Tirto.id: <https://tirto.id/jor-joran-buka-izin-impor-beras-mengamankan-jokowi-di-2019-cUkv>
- Kusumah, F. P. (2019). Ekonomi Politik dalam Kebijakan Impor Beras: Membaca Arah Kebijakan Pemerintah 2014-2019. *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik*, 148-156.
- Leonard, L. (2019, Oktober 11). *Menakar Ketahanan Pangan Indonesia*. Diambil kembali dari Kanal Ekonomi dan Bisnis: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191011/99/1158163/menakar-ketahanan-pangan-indonesia/2>
- Leonard, L. (2019, Oktober 11). *Menakar Ketahanan Pangan Indonesia*. Diambil kembali dari Kanal Ekonomi dan Bisnis: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191011/99/1158162/menakar-ketahanan-pangan-indonesia/1>
- Rosyidin, M. (2010). Metodologi Teori Pengambilan Keputusan. *Integrasi Struktur dan Unit: Teori Politik Luar Negeri dalam Prespektif Realisme Neoklasik*, 155.
- Safitri, C. (2014). Definisi Ketahanan Pangan. *Kajian Tingkat Ketahanan Pangan Rumah Tangga Dalam Rangka Mengurangi Rawan Pangan di Kota Bandar Lampung*, 14.